

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan suatu negara memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam proses ini, sektor pertanian menjadi salah satu bidang yang menjadi prioritas utama pemerintah. Hal ini disebabkan oleh peran strategis sektor pertanian dalam mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang serta mendorong pemulihan ekonomi nasional. Sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan, tetapi juga menjadi sumber utama lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk. Selain itu, sektor pertanian berkontribusi signifikan terhadap pendapatan nasional, memberikan devisa bagi negara, dan memiliki efek pengganda yang besar dengan ketergantungan impor yang rendah. Efek pengganda ini terlihat melalui keterkaitan erat antara sektor pertanian dengan berbagai industri, konsumsi, dan investasi. Dengan pertumbuhan yang secara konsisten menunjukkan tren positif, sektor ini memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Nadziroh, 2020).

Pupuk merupakan salah satu elemen penting dalam kegiatan pertanian yang berperan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan hasil panen. Di Indonesia, kebutuhan akan pupuk semakin tinggi karena sektor pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional (Hartatik et al., 2015). Luasnya lahan pertanian yang dikelola oleh petani, khususnya untuk komoditas utama seperti padi, jagung, kedelai, dan hortikultura, memerlukan ketersediaan pupuk dalam jumlah yang mencukupi.

Namun, bagi sebagian besar petani kecil yang menjadi tulang punggung sektor pertanian di Indonesia, harga pupuk nonsubsidi yang relatif mahal sering menjadi tantangan utama dalam mengelola usaha tani. Kondisi ini diperburuk

oleh daya beli petani yang terbatas, mengingat pendapatan mereka sangat bergantung pada hasil panen. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, pemerintah melaksanakan program subsidi pupuk yang bertujuan mempermudah petani mendapatkan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau. Program ini dirancang tidak hanya untuk meringankan beban biaya produksi petani, tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas pertanian, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani dan stabilitas pangan nasional.

Subsidi pupuk terutama diberikan untuk komoditas prioritas seperti padi dan jagung, yang menjadi bahan pangan utama bagi sebagian besar masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem dengan memastikan penggunaan pupuk sesuai kebutuhan lahan. Melalui program subsidi ini, pemerintah berharap dapat mendukung petani kecil agar tetap produktif serta berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi pedesaan dan ketahanan pangan nasional secara keseluruhan. Program distribusi pupuk bersubsidi merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah pusat dalam mendukung sektor pertanian nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, seperti Permentan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi di Sektor Pertanian, serta Permentan Nomor 1 Tahun 2024 sebagai dasar pelaksanaan terbaru. Melalui kebijakan ini, penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan menggunakan sistem e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang menjadi acuan utama dalam mendata petani penerima subsidi secara akurat dan transparan.

Pupuk bersubsidi merupakan program bantuan dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk membantu petani memperoleh pupuk anorganik, seperti urea, NPK, dan ZA, secara lebih terjangkau. Jenis pupuk ini secara luas digunakan oleh petani untuk meningkatkan produktivitas tanaman karena kandungan unsur haranya yang

tinggi, sehingga menjadi pilihan utama dalam mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Dalam pelaksanaannya, kebijakan pemerintah terkait distribusi pupuk bersubsidi dijalankan melalui sistem e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), yang menjadi dasar validasi data petani yang berhak menerima pupuk bersubsidi. Namun, pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait distribusi pupuk bersubsidi menghadapi sejumlah tantangan. Menurut (Moko et al., 2018) beberapa masalah utama yang muncul meliputi kelangkaan pupuk, fluktuasi harga, serta penggunaan pupuk oleh petani yang sering kali melebihi dosis yang dianjurkan. Tingginya permintaan pupuk menyebabkan keterbatasan stok, sementara ketersediaan di tingkat pengecer dan distributor sering kali tidak mencukupi. Selain itu, sering terjadi kekosongan stok pupuk, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga di pasar. Situasi ini disebabkan oleh distribusi pupuk bersubsidi yang belum merata, baik di tingkat distributor regional maupun di tingkat petani. Masalah terkait pengawasan, pengadaan, dan distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia tetap menjadi fokus perhatian Kementerian Pertanian.

Untuk meningkatkan efisiensi, pemerintah telah melakukan perubahan dalam mekanisme distribusi pupuk bersubsidi guna mengurangi hambatan birokrasi yang sebelumnya memperlambat proses penyaluran. Menurut Kementerian Pertanian, sejumlah tantangan masih perlu diatasi, seperti distribusi pupuk yang tidak tepat sasaran sehingga banyak petani tidak menerima pupuk sesuai kebutuhannya. Sebagai contoh, baru-baru ini polisi berhasil membongkar penggelapan pupuk bersubsidi sebanyak 40 ton di wilayah Kabupaten Bandung. Tersangka berinisial SS diduga memanipulasi data distribusi pupuk yang seharusnya disalurkan ke Kecamatan Nagrek dan sekitarnya. Alih-alih sampai kepada petani yang membutuhkan, pupuk tersebut justru dijual ke luar wilayah, yaitu ke Kabupaten Garut. Menurut Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo, tersangka telah menjalankan aksinya sejak September 2024 dengan memanipulasi data penyaluran, sehingga menguntungkan dirinya secara finansial. Akibatnya, petani di wilayah

Kecamatan Nagrek mengalami kekurangan stok pupuk bersubsidi yang seharusnya mereka terima.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam sistem distribusi dan lemahnya pengawasan dapat membuka peluang penyalahgunaan dalam pelaksanaan kebijakan subsidi. Hal ini berdampak langsung pada petani yang sangat bergantung pada pupuk bersubsidi untuk mempertahankan hasil pertanian mereka. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi, khususnya yang berbasis sistem e-RDKK, agar program ini benar-benar tepat sasaran, transparan, dan efisien dalam pelaksanaannya di lapangan.

Kelangkaan pupuk dan kenaikan harga di tingkat petani merupakan permasalahan krusial yang berdampak langsung pada keberlanjutan sektor pertanian di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bandung. Mahalnya harga pupuk dan tidak meratanya distribusi sering kali menyebabkan penurunan produktivitas, terutama bagi petani kecil yang sangat bergantung pada subsidi pemerintah. Menyadari hal ini, Kementerian Pertanian Republik Indonesia terus berupaya meningkatkan efektivitas distribusi pupuk bersubsidi agar lebih tepat sasaran, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan aktual di lapangan. Salah satu upaya konkret yang dilakukan pemerintah adalah penerapan sistem e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Sistem ini digunakan untuk memverifikasi dan mendata petani yang berhak menerima pupuk bersubsidi. Data yang dimasukkan ke dalam e-RDKK berasal dari kelompok tani dan diverifikasi oleh penyuluh lapangan, sehingga memastikan bahwa hanya petani aktif yang benar-benar menggarap lahan yang terdaftar sebagai penerima bantuan. Dengan berbasis elektronik, e-RDKK diharapkan mampu meminimalisir kecurangan dalam pendataan serta mempercepat proses alokasi pupuk dari pusat ke daerah.

Selain e-RDKK, pemerintah juga mendorong penggunaan Kartu Tani sebagai alat kontrol dan transaksi dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi. Kartu Tani memuat informasi lengkap mengenai identitas petani, luas lahan,

dan jenis pupuk yang berhak diterima. Penggunaan Kartu Tani diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020, yang juga menetapkan alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi. Selain itu, penerapan Kartu Tani menjadi bagian dari strategi digitalisasi pertanian dalam upaya transparansi dan efisiensi distribusi. Program Kartu Tani juga mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada petani sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Untuk mendukung implementasi Kartu Tani, pemerintah bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI, untuk mencetak dan menyalurkan kartu tersebut kepada petani yang telah terdaftar di e-RDKK.

Di tingkat daerah, sejumlah pemerintah kabupaten termasuk Pemerintah Kabupaten Bandung juga meluncurkan program pendukung seperti Program Petani Bedas Sejahtera, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui hibah alat dan sarana produksi. Meskipun program ini tidak menyalurkan pupuk bersubsidi secara langsung, sebagian besar penerimanya juga terdaftar dalam sistem e-RDKK, sehingga berada dalam ekosistem yang sama dengan kebijakan subsidi pupuk nasional. Salah satu inisiatif program tersebut adalah Kartu Tani Si Bedas, yang diberikan kepada petani pelaku UMKM yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Program ini bertujuan memperluas akses petani terhadap bantuan daerah sekaligus memperkuat akurasi data pertanian.

Korelasi antara sistem e-RDKK, penggunaan Kartu Tani, dan pelaksanaan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi menjadi sangat penting untuk dievaluasi, karena ketiganya saling terkait dalam mendukung ketepatan sasaran program subsidi pemerintah. Meskipun sistem ini dirancang untuk memperbaiki mekanisme penyaluran, kenyataannya masih banyak tantangan yang ditemukan di lapangan, seperti penyimpangan distribusi, keterlambatan penyaluran, hingga ketidaksesuaian antara alokasi dan kebutuhan riil petani. Oleh karena itu,

dengan memahami secara mendalam bagaimana sistem e-RDKK diterapkan sebagai dasar distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bandung, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas kebijakan tersebut, serta menawarkan masukan strategis bagi perbaikan sistem distribusi yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

Kartu Tani Si Bedas yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Program Petani Bedas Sejahtera merupakan salah satu bentuk inovasi daerah dalam mendukung kesejahteraan petani dan mempercepat akses terhadap bantuan pertanian. Meskipun Kartu Tani Si Bedas bukan bagian dari skema resmi penyaluran pupuk bersubsidi pemerintah pusat, keberadaannya turut mendukung kerapian data dan identitas petani penerima bantuan, termasuk mereka yang juga tercatat dalam sistem e-RDKK. Melalui kartu ini, diharapkan proses penyaluran bantuan, termasuk sarana produksi, bisa berjalan lebih tertib, cepat, dan transparan. Program ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menyinergikan upaya pusat dan daerah dalam melindungi dan memberdayakan petani. Pemerintah Kabupaten Bandung bekerja sama dengan bank-bank milik negara (HIMBARA) seperti BRI, Mandiri, dan BNI untuk mencetak dan mendistribusikan kartu kepada petani. Harapannya, Kartu Tani ini dapat mempermudah akses petani terhadap berbagai bantuan, serta memperkuat proses pendataan secara digital. Meski demikian, program ini tetap berdiri sendiri dan berbeda dengan Kartu Tani yang digunakan secara nasional dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

Sementara itu, kebijakan pupuk bersubsidi yang berlaku secara nasional mengalami sejumlah penyesuaian. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, kini hanya sembilan jenis komoditas yang masuk dalam daftar prioritas penerima pupuk bersubsidi, yakni padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, kopi, tebu, dan kakao. Padahal sebelumnya, pupuk bersubsidi mencakup lebih dari 60 komoditas. Pembatasan ini menyebabkan petani yang menanam komoditas di luar daftar prioritas harus membeli pupuk dengan harga nonsubsidi yang jauh lebih mahal, antara Rp5.000 sampai

Rp8.000 per kilogram, dibandingkan dengan harga subsidi sebesar Rp2.250 per kilogram. Agar bisa mengakses pupuk bersubsidi, petani harus memenuhi sejumlah syarat. Di antaranya, terdaftar dalam kelompok tani, tercatat dalam sistem e-RDKK, serta masuk ke dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN). Proses pendataan ini dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa hingga kabupaten, dan berlanjut ke pusat. Setelah proses validasi selesai, barulah petani dapat menebus pupuk di kios resmi yang telah ditunjuk.

Namun dalam praktiknya, proses ini kerap menghadapi kendala, seperti kesalahan data NIK, koneksi internet yang terbatas, hingga kapasitas server yang lambat. Tidak sedikit petani yang mengaku telah memenuhi syarat, tetapi tidak terdata, sehingga tidak bisa menerima pupuk bersubsidi. Selain itu, proses penebusan di lapangan juga dinilai cukup berbelit dan memakan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang digunakan masih memiliki celah dan perlu dievaluasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian terhadap kebijakan distribusi pupuk bersubsidi, khususnya yang berbasis sistem e-RDKK, agar ke depan distribusi bisa lebih adil, tepat sasaran, dan efisien bagi petani, terutama di daerah seperti Kabupaten Bandung.

**Tabel 1. 1 Realisasi Penyaluran Kabupaten Bandung Periode Bulan Januari-September 2024**

| NO           | JENIS PUPUK | RDKK       | ALOKASI    | PENYALURAN | %      | SISA ALOKASI | SISA RDKK  |
|--------------|-------------|------------|------------|------------|--------|--------------|------------|
| 1            | UREA        | 30.018,697 | 25.924,000 | 12.258,759 | 47,29% | 13.665,241   | 17.759,938 |
| 2            | NPK         | 38.235,846 | 21.783,000 | 8.433,328  | 38,72% | 13.349,672   | 29.802,518 |
| <b>TOTAL</b> |             | 68.254,543 | 47.707,000 | 20.692,087 | 43,37% | 27.014,913   | 47.562,456 |

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bandung (2024)

Pada Tabel 1.1 yang disajikan menunjukkan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Bandung selama periode Januari hingga September

tahun 2024. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, tercatat sebanyak 78.905 petani telah terdaftar dalam sistem e-RDKK, dari total 126.743 petani aktif yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bandung. Melihat besarnya potensi ini, maka kebutuhan terhadap pupuk bersubsidi menjadi sangat penting sebagai salah satu faktor penunjang utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah menetapkan alokasi pupuk subsidi melalui sistem e-RDKK, realisasi penyaluran pupuk di lapangan masih jauh dari maksimal. Untuk pupuk urea, dari alokasi sebesar 25.924 ton, realisasi penyaluran hanya mencapai 12.258,759 ton atau sebesar 47,29%. Artinya, lebih dari separuh alokasi pupuk urea belum tersalurkan kepada petani yang telah tercatat dalam RDKK. Sisa alokasi urea yang tidak tersalurkan sebesar 13.665,241 ton, dan sisa RDKK menunjukkan masih banyak kebutuhan yang belum terpenuhi. Hal serupa terjadi pada pupuk NPK, dengan realisasi penyaluran sebesar 8.433,328 ton dari alokasi 21.783 ton, atau hanya 38,72%. Total keseluruhan realisasi pupuk subsidi baru mencapai 43,37% dari total alokasi yang tersedia.

Ketimpangan antara alokasi dan realisasi tersebut dapat mengindikasikan beberapa persoalan dalam pelaksanaan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah permasalahan dalam proses *input* dan validasi data petani di sistem e-RDKK, keterlambatan proses verifikasi, atau hambatan teknis lainnya seperti kendala logistik di tingkat distributor dan kios. Kondisi ini tentunya berdampak langsung terhadap petani, khususnya dalam masa tanam ketika kebutuhan pupuk berada pada puncaknya. Evaluasi terhadap pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah dirancang berjalan secara efektif di lapangan.

Sistem e-RDKK sebenarnya diharapkan dapat menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa alokasi pupuk subsidi disesuaikan dengan kebutuhan riil petani. Namun jika pelaksanaannya belum optimal, maka perlu adanya upaya perbaikan, baik dari sisi teknis sistem, pengawasan distribusi, hingga

peningkatan kapasitas penyuluh dan kelompok tani dalam proses pendataan. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi tidak hanya lebih tepat sasaran, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas petani dan mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Bandung secara berkelanjutan.

Kabupaten Bandung dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki sejumlah alasan akademis yang mendukung. Pertama, daerah ini dikenal memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, khususnya sebagai salah satu penghasil utama padi. Potensi ini menjadikan Kabupaten Bandung sebagai kawasan strategis untuk mengkaji kebijakan pertanian secara mendalam. Kedua, Kabupaten Bandung menerapkan sistem distribusi pupuk bersubsidi yang berbasis e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), yaitu sistem pendataan yang digunakan secara nasional oleh pemerintah untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran. Melalui sistem ini, petani yang terverifikasi dapat mengakses pupuk sesuai dengan kebutuhan tanam yang telah direncanakan dan dihitung sebelumnya oleh kelompok tani dan penyuluh lapangan. Ketiga, kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bandung memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari kebijakan serupa di wilayah lain. Hal ini dikarenakan adanya tantangan lokal seperti keterlambatan penyaluran, kesenjangan antara alokasi dan kebutuhan, serta masih adanya petani yang belum terdaftar dalam sistem secara akurat. Dengan adanya kondisi tersebut, Kabupaten Bandung menjadi daerah yang relevan untuk mengkaji bagaimana implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi melalui sistem e-RDKK berjalan di lapangan, serta bagaimana dampaknya terhadap produktivitas dan keberlangsungan usaha tani masyarakat.

Dari setiap regulasi kebijakan, adakalanya mengalami keberhasilan, namun terkadang juga terdapat beberapa kegagalan di dalamnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dampak kebijakan guna menentukan pengaruhnya terhadap kondisi kehidupan nyata (Yunnisa et al., 2022). Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa setiap regulasi kebijakan memiliki

potensi keberhasilan sekaligus kemungkinan kegagalan. Kondisi ini menegaskan pentingnya evaluasi terhadap dampak kebijakan untuk menilai efektivitas dan efisiensinya. Pelaksanaan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi oleh pemerintah melalui sistem e-RDKK di Kabupaten Bandung menjadi salah satu contoh yang memerlukan evaluasi komprehensif. Evaluasi tersebut bertujuan untuk menilai sejauh mana program ini mencapai tujuan yang telah direncanakan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi di lapangan. Dengan demikian, peneliti merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut secara mendalam, yang dirumuskan dalam judul **“Evaluasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi melalui Sistem E-RDKK oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bandung.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan peneliti dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Terdapat kendala dalam aspek *input*, seperti regulasi dan kebijakan pelaksana, ketersediaan sumber daya manusia, serta keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi melalui sistem e-RDKK di Kabupaten Bandung.
2. Proses pelaksanaan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi melalui sistem e-RDKK belum berjalan optimal, khususnya dalam hal pendataan petani, mekanisme verifikasi, serta koordinasi antara Dinas Pertanian, kios pengecer, dan kelompok tani.
3. *Output* dari kebijakan ini belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan, ditandai dengan masih adanya ketidaksesuaian jumlah pupuk yang diterima oleh petani, serta keterlambatan distribusi di lapangan.
4. *Outcomes* dari kebijakan distribusi pupuk bersubsidi melalui sistem e-RDKK belum sepenuhnya dirasakan oleh petani, seperti dalam hal

kemudahan akses terhadap pupuk, kepastian mendapatkan alokasi pupuk subsidi, dan peningkatan produktivitas pertanian.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana evaluasi penggunaan (*input*) dalam pelaksanaan program distribusi pupuk bersubsidi melalui e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) bagi petani di Kabupaten Bandung?
2. Sejauh mana (*process*) pelaksanaan program distribusi pupuk bersubsidi?
3. Apa saja (*output*) yang dihasilkan dari program distribusi pupuk bersubsidi, dan bagaimana pencapaiannya dibandingkan dengan target yang ditetapkan?
4. Bagaimana dampak (*outcomes*) dari program distribusi pupuk bersubsidi terhadap kesejahteraan petani dan produktivitas pertanian di Kabupaten Bandung?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui evaluasi penggunaan (*input*) dalam pelaksanaan program distribusi pupuk bersubsidi melalui e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) bagi petani di Kabupaten Bandung.
2. Mengetahui (*process*) pelaksanaan program distribusi pupuk bersubsidi.
3. Mengetahui (*output*) yang dihasilkan dari program distribusi pupuk bersubsidi, dan bagaimana pencapaiannya dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

4. Mengetahui dampak (*outcomes*) dari program distribusi pupuk bersubsidi terhadap kesejahteraan petani dan produktivitas pertanian di Kabupaten Bandung.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan manfaat kepada berbagai pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan ini memberikan sumbangsih literatur dan pengetahuan bagi sesama akademisi maupun peneliti, yang dapat bermanfaat untuk memperluas dan memperdalam kajian, konsep, hingga teori tentang evaluasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi, khususnya dalam konteks kebijakan pertanian di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Pemerintah: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi bagi petani melalui sistem e-RDKK agar lebih efektif dan tepat sasaran.
- b. Penulis: Penelitian ini memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperdalam pemahaman tentang evaluasi kebijakan publik, khususnya distribusi pupuk bersubsidi, sekaligus meningkatkan kemampuan analisis, berpikir kritis, dan keterampilan riset yang dapat bermanfaat untuk pengembangan karier di bidang akademik maupun profesional.
- c. Masyarakat: Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya program subsidi pupuk dan dampaknya terhadap ketahanan pangan, serta mendorong partisipasi aktif dalam program-program yang ada.

- d. Peneliti: Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi, bahan penelitian, dan bahan pengembangan untuk pendalaman wawasan seputar masalah-masalah dalam evaluasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi dan pertanian.

## **F. Kerangka Berpikir**

Dalam penelitian ini, pemilihan teori evaluasi kebijakan Bridgman dan Davis (2000) didasarkan pada alasan akademis yang kuat, meskipun terdapat banyak teori evaluasi kebijakan lainnya. Teori ini menawarkan pendekatan evaluasi yang komprehensif melalui empat indikator utama: *input*, *process*, *output*, dan *outcomes*. Indikator-indikator ini memungkinkan analisis yang sistematis dan terstruktur, sehingga sangat relevan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan distribusi pupuk melalui sistem E-RDKK bagi petani di Kabupaten Bandung. Pendekatan ini memastikan bahwa seluruh aspek implementasi kebijakan dapat dinilai secara menyeluruh, mulai dari perencanaan sumber daya hingga dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun berdasarkan tiga konsep dasar, yaitu *Grand Theory*, *Middle Theory*, dan *Applied Theory*. Ketiga konsep ini menjadi acuan utama dalam menganalisis dan menjelaskan evaluasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi melalui sistem E-RDKK oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bandung. Penyusunan kerangka berpikir ini didasarkan pada teori-teori yang relevan, sehingga memberikan landasan akademis yang kuat. Dengan kerangka berpikir yang jelas dan terstruktur, peneliti dan pembaca dapat memahami tujuan serta proses analisis penelitian ini secara sistematis.

### **1. *Grand Theory***

*Grand Theory* dalam penelitian ini adalah administrasi publik. Menurut (Pasolong, 2014), administrasi publik merupakan bentuk kerja sama antara dua atau lebih kelompok atau badan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan secara efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Administrasi

publik menjadi kerangka dasar karena kebijakan distribusi pupuk bersubsidi ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam konteks ini, administrasi publik berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan.

## 2. *Middle Theory*

*Middle Theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan publik. (Nugroho, 2014) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian aturan hukum yang dirancang pemerintah untuk mengatur kehidupan bersama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan kondisi yang aman, damai, dan makmur. Kebijakan distribusi pupuk bersubsidi melalui sistem E-RDKK adalah wujud nyata dari kebijakan publik yang bertujuan mendukung sektor pertanian di Kabupaten Bandung. Alasan akademis memilih kebijakan publik sebagai kerangka tengah adalah relevansinya dalam memahami bagaimana kebijakan ini dirancang, diterapkan, dan direspon oleh masyarakat, khususnya petani.

## 3. *Applied Theory*

*Applied Theory* dalam penelitian ini adalah evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan distribusi pupuk bersubsidi dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Menurut Bridgman dan Davis (2000) dalam (Tayibnapis, 2008), evaluasi kebijakan melibatkan empat indikator utama, yaitu:

- 1) *Input* (masukan): Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan.
- 2) *Process* (pelaksanaan): Proses operasional dalam mengimplementasikan kebijakan.
- 3) *Output* (hasil): Hasil langsung dari kebijakan yang diimplementasikan.
- 4) *Outcomes* (dampak): Pengaruh jangka panjang terhadap masyarakat, khususnya petani dalam penelitian ini.

Evaluasi kebijakan ini penting untuk mengidentifikasi keberhasilan atau kendala dalam pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi, sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang relevan. Pemilihan indikator ini didasarkan pada kebutuhan akademis untuk menganalisis kebijakan secara menyeluruh, dari perencanaan hingga dampaknya pada masyarakat.

Dengan demikian, kerangka berpikir ini memberikan landasan konseptual yang kuat untuk menjelaskan hubungan antara teori administrasi publik, kebijakan publik, dan evaluasi kebijakan. Selain itu, kerangka ini membantu peneliti memahami bagaimana kebijakan distribusi pupuk bersubsidi dapat memberikan manfaat optimal bagi petani di Kabupaten Bandung. Struktur ini ditampilkan secara sistematis dalam diagram kerangka berpikir yang terlampir.



**Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran**

